PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS BUDI RAHARJA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **166612**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.033.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1087 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 1.510.000.000
2. Tanah Seluas 1325 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 143.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Tanah Seluas 1263 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 684.600.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.100.000

5. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. MOBIL, NISSAN FRONTIER 2.5 AT / PICK UP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
7. MOBIL, HONDA HONDA BRV DG3 1.5L Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
8. MOTOR, POLYTRON PEV 30M1 A/T/SPD MOTOR SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**377.500.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**128.421.809**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**1.892.700.000**
	Sub Total	**Rp.**	**5.116.221.809**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**368.013.965**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**4.748.207.844**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.